



LEMHANNAS RI

NEWSLETTER

TIADA KEBENARAN YANG MENDUA

EDISI XIII 20 AGUSTUS 2010

PENGHARGAAN PEMERINTAH KEPADA LEMHANNAS RI



Penyerahan penghargaan WTP dari pemerintah oleh Wakil Presiden Boediono kepada Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H.

S elasa tanggal 27 Juli 2010, Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. menerima penghargaan dari Pemerintah RI atas laporan keuangan yang berkualitas baik dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK/RI). Selain Lemhannas RI ada 44 (empat puluh empat) Kementerian dan Lembaga lain yang menerima penghargaan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. DR. Boediono pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juli 2010 di Hotel Borobudur.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Bagi Lemhannas RI, penghargaan dari pemerintah ini adalah yang ketiga kalinya berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010 setelah pada tanggal 8 Juni 2010 lalu Lemhannas RI menerima hasil audit BPK/RI yang mendapatkan opini WTP.

Prestasi yang diraih tersebut membuktikan bahwa pengelolaan anggaran Lemhannas RI telah memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan penerapan sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif, efisien, dan produktif. Pengelolaan anggaran dan keuangan tidak

terdapat unsur manipulatif dan salah saji yang material. Pencatatan dan laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta kecukupan bukti dalam pengungkapan data. Keberhasilan Lemhannas RI dalam pengelolaan program dan anggaran yang diwujudkan dalam akuntabilitas laporan keuangan adalah merupakan hasil kerja keras seluruh warga Lemhannas RI dan juga tidak lepas dari pihak lain yang terkait dalam berbagai forum berupa sarasehan, lokakarya, pemeriksaan, bimbingan, dan koordinasi serta konsultasi. Penghargaan tersebut akan menjadi kebanggaan bagi Lemhannas RI dan bagi seluruh warganya.



DAFTAR ISI

1. Penghargaan Pemerintah Kepada Lemhannas RI.....	1
2. Membangun Sikap Politik terhadap Penegakan Hukum.....	2
3. Round Table Discussion: Ekonomi.....	3
4. Round Table Discussion: Pertahanan dan Keamanan.....	3
5. Round Table Discussion: Internasional.....	4
6. Photo Gallery Kunjungan Kerja Gubernur Lemhannas RI ke China.....	5
7. Upacara Peringatan HUT ke-65 Republik Indonesia.....	6
8. Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dalam Rangka Mendukung Pemajuan IPTEK.....	7
9. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mendukung kemajuan IPTEK.....	7
10. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional.....	8
11. Rapat Direktif SSDN PPRA XLV.....	9
12. Penyerahan Buku Pengetahuan dari peserta PPRA XLIV ke Perpustakaan Lemhannas RI.....	9
13. Kunjungan Delegasi National Defence College of Thailand.....	10
14. Kunjungan The Naval Postgraduate School (NPS) dan The Defence Threat Reduction Agency (DTRA).....	10
15. Kunjungan Perpamsi.....	11
16. Kunjungan Parfi.....	11
17. Diskusi Panel : Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender.....	12

MEMBANGUN SIKAP POLITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Jumat, tanggal 30 Juli 2010 Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH memberikan ceramah kepada para peserta PPRA XLV di Gedung Trigatra Lt. III Barat Lemhannas RI yang mengangkat tema “**Membangun Sikap Politik Terhadap Penegakan Hukum yang Mengakomodasi Keadilan Warga Tak Mampu dan Kelompok Marginal Lainnya dan Kualitas SDM Hukum yang Diharapkan**”. Sekalipun tema ceramah tersebut mengkritisi ketidakadilan dalam bentuk marginalisasi (sengaja atau tidak sengaja) kelompok orang tidak mampu (*the poor*) dan kelompok marginal lain dalam proses penegakan hukum, namun sebenarnya tema ceramah tersebut juga mengandung konotasi larangan untuk melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang tidak tergolong “tidak mampu” atau kelompok marginal lainnya, namun target pemikiran yang hendak dicapai adalah kesadaran untuk menghilangkan kesenjangan (*cleavage*)/ mendekati perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara 2 (dua) kelompok tersebut baik atas dasar instrumen hukum HAM Internasional (Piagam HAM PBB/ *Universal Declaration Human Rights-UDHR* dan perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik/ *International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) maupun dalam hukum nasional termasuk UUD RI tahun 1945. Kita mengenal suatu prinsip yang sangat fundamental yaitu prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law/equality under the law/legal egalitarianism*) prinsip persamaan dimuka hukum secara simultan bersama-sama dengan prinsip-prinsip hak untuk diakui sebagai manusia di depan hukum (*the right to recognition as a person before the law*); hak untuk diadili secara adil (*the right to a fair and competent trial*); merupakan bagian dari aspek-aspek umum asas fundamental non-diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, aspirasi politik, bangsa atau asal usul, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Dalam ceramahnya Gubernur Lemhannas RI menyampaikan bahwa politik penegakan hukum yang didasarkan atas prinsip supremasi hukum dan promosi serta perlindungan HAM merupakan sikap konsisten terhadap nilai-nilai dasar atau “*core values/ the root principles*” demokrasi bersama-sama dengan nilai-nilai dasar demokrasi lain seperti: sistem *checks and balances* yang sehat, pemilihan umum yang jujur; asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*); kebebasan *mass media*; desentralisasi kekuasaan/kewenangan (otonomi daerah); hukum yang demokratis; kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of the judiciary*); ruang berkembang masyarakat madani (*civil society*); kontrol sipil terhadap militer dan lain-lain. Yang menjadi masalah adalah telah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penegakan hukum, yang karena alasan tertentu yang bersifat diskriminatif telah merugikan jalan masuk untuk para pencari keadilan (*access to justice*) mereka yang tidak mampu (pelanggaran HAM vertikal) atau kelompok marginal lain dapat berbahaya terhadap keamanan eksistensi negara hukum (bahaya keamanan simetrik), tetapi cenderung juga berbahaya terhadap “*human security*” yakni keamanan manusia baik pribadi,



Gubernur Lemhannas RI memberikan ceramah kepada peserta PPRA XLV di Gd. Trigatra Lt. III Barat Lemhannas RI

kelompok maupun masyarakat luas (bahaya keamanan asimetrik), bahkan berpotensi untuk menimbulkan bahaya terpadu (*hybrid security threat*) yang dapat membahayakan ketahanan nasional.

Secara luas penyalahgunaan wewenang bisa mencakup hal-hal yang dinamakan perlindungan HAM dalam proses peradilan atau “*the protection of human rights in the administration of justice*”. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum dan rekomendasi seperti: **pertama**, menghayati pergeseran pendekatan *war making (harm creating)* atas dasar prinsip *disconnected* dalam menghayati penyakit sosial (*adversarialism*) ke arah pendekatan *peacekeeping* atas dasar prinsip *interconnections among humans (mutualism)*; **kedua**, menggalakkan penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); **ketiga**, menggalakkan pendayagunaan alternatif penyelesaian sengketa dan *arbitrase*; termasuk program keadilan restoratif melalui mediasi yang melibatkan masyarakat dan korban (*restorative justice*); **keempat**, pembaharuan pendidikan dan latihan hukum dengan menggalakkan “*sociological jurisprudence*” dan menjauhi *positivisasi* hukum; **kelima**, pembaharuan dan penguatan hukum (*legal empowerment*); **keenam**, penyuluhan hukum (*legal information and public awareness*); **ketujuh**, bantuan akses ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan (*right to court and justice access*); **kedelapan**, *advokasi*, pendampingan dan bantuan hukum (*legal aid*); **kesembilan**, Konsultasi dan bantuan hukum gratis (*pro bono work*); **kesepuluh**, gugatan atas dasar kepentingan umum atau *public interest litigation* atau *class action*; **kesebelas**, peningkatan kesadaran terhadap kode etik dan profesionalisme di kalangan penegak hukum; **keduabelas**, peningkatan kesadaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*); **ketigabelas**, selalu mendayagunakan secara akurat hukum dan kebijakan sebagai sarana pengintegrasian (*law as integrative mechanism*) dalam sistem sosial, baik hukum sebagai sarana ketertiban (*tool of social control*) maupun sebagai sarana perubahan sosial (*tool of social engineering*).

ROUND TABLE DISCUSSION EKONOMI

Selasa, 13 Juli 2010 bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI, diselenggarakan *Round Table Discussion* bidang ekonomi oleh Direktorat Pengkajian Bidang Ekonomi yang dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, SH. dengan tema **“Strategi Peningkatan Penerimaan Negara di Sektor Pajak dan Bukan Pajak untuk Meningkatkan Stabilitas Keuangan Negara dalam Mendukung Pembangunan Nasional”**

Mengawali sambutannya Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, tantangan utama pertama pembangunan tahun 2011 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu

menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Tantangan utama kedua adalah membangun tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah. Tantangan utama ketiga adalah meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah.

Sebagai salah satu bagian dari pendapatan negara yang tercantum dalam unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar hibah yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dalam mencapai tujuan nasional, kedua sektor tersebut merupakan salah satu andalan pemasukan negara. Namun demikian dalam implementasinya, sering terjadi penyimpangan antara target dengan realisasi yang terjadi. Untuk itu pemerintah sering melaksanakan penyesuaian target berdasarkan perubahan dengan

menggunakan asumsi tertentu.

Di akhir sambutan, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan



Suasana RTD Ekonomi di Ruang Rapat Nusantara I, Gd. Trigatra

harapannya kepada para pembicara dan para penanggap dalam *Round Table Discussion* tersebut agar dapat memberikan masukan atau sumbang saran untuk penyempurnaan naskah kajian tersebut.

ROUND TABLE DISCUSSION PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Padatanggal 14 Juli 2010, bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI, Gubernur Lemhannas RI membuka Round Table Discussion bidang Hankam yang di selenggarakan oleh Direktorat Pengkajian Hankam dengan tema **“Meningkatkan Sinergitas Pengamanan Obyek Vital Nasional Strategis untuk Menjaga Stabilitas Keamanan di Kawasan Obvitnasstrat dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”**.

Dalam sambutannya Gubernur menyatakan bahwa obyek vital nasional memiliki peran penting bagi kehidupan

bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan kepentingan nasional atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Oleh sebab itu, kesiapan dan kesiagaan untuk mencegah dan menjaga gangguan keamanan di kawasan obyek vital nasional tersebut menjadi suatu keharusan untuk dilakukan secara terus menerus (*sustainability*) bahkan ditingkatkan baik oleh pengelola maupun aparat keamanan.

Mencermati pengaruh perkembangan lingkungan strategis (global, regional, dan nasional) di era globalisasi ini, dapat diprediksi (*forecasting*) bahwa ancaman atau gangguan terhadap obyek vital nasional akan semakin meningkat baik yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya maupun kelompok tertentu (*non-state actors*) untuk melakukan sabotase terhadap obyek vital nasional dan bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi sasaran para pelaku teroris, dengan alasan politis (*political crime*) dan

cenderung menjadi bahaya asimetrik.

Faktor-faktor terjadinya ancaman dan gangguan keamanan di kawasan obyek vital nasional bisa beraneka ragam seperti akibat dari kecemburuan sosial, baik dari perekrutan karyawan dari masyarakat sekitar maupun pelaksanaan pembangunan atau pengembangan masyarakat (*Community Development* atau *Corporate Social Responsibility*) yang belum terlaksana dengan baik bahkan kehadiran obyek vital nasional tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya. Terjadinya ancaman dan gangguan terhadap obyek vital nasional tentu akan berdampak negatif baik terhadap perekonomian nasional maupun ketertiban umum serta keamanan negara yang akhirnya akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pencapaian tujuan nasional. Oleh sebab itu pengamanan obyek vital nasional harus dilakukan secara sinergis dan melibatkan seluruh kekuatan bangsa dan negara.



Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. membuka RTD Hankam

ROUND TABLE DISCUSSION INTERNASIONAL

"PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR NEGARA DI KAWASAN ASEAN GUNA MENGATASI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME"

Pada tanggal 27 Juli 2010 di ruang rapat Nusantara 1 Gd. Trigatra Lemhannas RI dilaksanakan *Round Table Discussion* tentang peningkatan kerjasama antar negara di kawasan ASEAN guna mengatasi *transnational organized crime* dalam rangka memperkokoh terwujudnya *ASEAN Political-Security Community*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, permasalahan kejahatan konvensional dan transnasional merupakan salah satu dari sebelas permasalahan pokok nasional yang harus segera ditanggulangi. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi Palermo) pada tanggal 17 Desember 2008, dan telah meratifikasi protokolnya yaitu "*the protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons,*

especially women and children" pada tanggal 3 Februari 2009. Indonesia juga telah meratifikasi "*The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*" yang secara langsung mengatur mengenai migran ilegal dengan UU No. 15 Tahun 2009.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang *multi-borderless, transnational organized methods* juga mengalami perkembangan yang makin canggih, di mana metode kejahatannya tidak lagi bersifat "tradisional". Untuk itu, penanganan tindak *transnational organized crime* melalui *inconventional method* dan multidisiplin ilmu dengan melibatkan negara-negara di kawasan khususnya ASEAN menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Pada tataran regional, ASEAN telah mengelompokkan isu *transnational crime* dalam 10 (sepuluh) permasalahan di antaranya

adalah terorisme, peredaran ilegal narkotika, kejahatan lintas batas manusia, pembajakan di laut, pencucian uang, penyelundupan senjata dan bahan peledak, kejahatan dunia maya, dan kejahatan ekonomi internasional. Negara anggota ASEAN harus memiliki *moral obligation* untuk bekerja sama secara sinergi dan komprehensif dalam menanggulangi *transnational organized crime*, dalam rangka menyukseskan Program Kerja untuk Menerapkan Rencana Aksi Memerangi Kejahatan Transnasional dan meratifikasi *the treaty on mutual legal assistance in criminal matters among ASEAN member states*. Pada tataran regional, dalam menanggulangi tindak *transnational organized crime* negara-negara anggota ASEAN masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti perbedaan sistem maupun kodifikasi hukum, *joint cooperation*, dan *joint task force* yang tidak berjalan sampai tataran teknis, perbedaan kemampuan infrastruktur dan aparatur, serta masih sulitnya menyatukan kesepahaman "realisasi perjanjian ekstradisi" antar negara-negara ASEAN.

Wakil Gubernur Lemhannas RI menyatakan bahwa *transnational organized crime* merupakan suatu permasalahan serius yang butuh penanganan segera bagi keberlangsungan pembangunan Indonesia dan diharapkan melalui *Round Table Discussion* ini, akan dilahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis, sehingga akan menghasilkan embrio-embrio rumusan kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.



Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb membuka acara *Round Table Discussion Internasional* di Ruang rapat Nusantara 1, Trigatra, Lemhannas RI

PHOTO GALLERY KUNJUNGAN KERJA GUBERNUR LEMHANNAS RI KE CHINA



Diskusi antara Lemhannas RI yang dipimpin Gubernur dengan pimpinan China-ASEAN Business Council di Beijing, China.



Penyerahan cinderamata dari pimpinan China-ASEAN Business Council kepada Gubernur Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI melakukan official visit dengan Top Management China Railway Group Ltd.



Official visit Gubernur Lemhannas RI dengan pimpinan Academy of Military Science



Penyerahan cinderamata dari pimpinan Academy of Military Science kepada Gubernur Lemhannas RI



Photo bersama Rombongan Gubernur Lemhannas RI dengan pimpinan Academy of Military Science beserta staf dari AMS

UPACARA PERINGATAN HUT KE-65 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



Upacara Peringatan HUT Ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Tengah, Lemhannas RI



Pengibaran Bendera diiringi Lagu Indonesia Raya



Gubernur Lemhannas RI membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia



Perwira Menengah yang ikut serta dalam upacara bendera



Pejabat Eselon III yang mengikuti upacara bendera

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. memberikan amanat pada tanggal 17 Agustus 2010 saat Upacara dalam rangka peringatan HUT ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh warga Lemhannas juga peserta PPRA XLIV dan XLV. Gubernur mengingatkan, bahwa ancaman yang merongrong keselamatan bangsa terus meningkat, juga terhadap pembangunan nasional, antara lain, ditandai dengan menurunnya semangat nasionalisme bangsa, rendahnya militansi bangsa, melunturnya jati diri dan kultur bangsa. Jiwa dan semangat nilai-nilai perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, harus tetap menjadi pegangan yang teguh dan kemudian dikembangkan dan diaktualisasikan secara lebih konkrit, responsif, dan akomodatif, untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa.

Besar harapan Gubernur agar peserta dapat mengikuti perkembangan permasalahan bangsa dan dinamika demokrasi Indonesia serta mampu menerapkan sikap kritis dalam melihat setiap permasalahan, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai ideologi nasional, mempersiapkan kader pimpinan bangsa yang dilandasi jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, dan mampu memberikan karya-karya terbaiknya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.



Peserta PPRA XLIV yang turut hadir pada upacara bendera



Pejabat Eselon I dan II Lemhannas RI serta para peserta PPRA yang berpangkat PATI sebagai peserta upacara



Peserta PPRA XLV yang turut hadir pada upacara bendera

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA Mendukung PEMAJUAN IPTEK

Jumat, 23 Juli 2010 di Gd. Pancagatra Lt.III Barat, Lemhannas RI, Menteri Perindustrian, M.S.Hidayat, memberikan ceramah kepada para peserta PPRA XLIV yang bertema "**Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian dalam Rangka Mendukung Pemanjuaan IPTEK**".



Peserta PPRA XLIV saat mendengarkan ceramah dari Menteri Perindustrian RI,

Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) adalah mengatur mengenai arah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang dalam mempercepat proses industrialisasi. Perpres tersebut adalah antisipasi terhadap dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangannya di masa yang akan datang. Sebagai tujuan jangka panjang, Menteri Perindustrian memaparkan Visi Industri Indonesia di tahun 2025 yaitu "**Indonesia Menjadi Sebuah Negara Industri Tangguh di Dunia**", dengan visi di tahun 2020 menjadi "**Negara Industri Maju Baru**".

Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa industri Indonesia terus mengalami tantangan antara lain dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, terus

berubahnya selera konsumen dan segmen pasar, dan tekanan persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, strategi kebijakan dibuat berbentuk pengembangan teknologi sederhana, madya, dan maju. Kementerian Perindustrian telah melakukan penelitian dan pengembangan teknologi seperti mempercepat penerapan dan pengembangan teknologi industri di sektor industri, seperti pengembangan Nanoteknologi, Bioteknologi, Energi, Lingkungan, dan Pangan; pengembangan pusat inovasi dan *pilot project* di daerah; mendirikan inkubator teknologi; mengembangkan teknologi menuju *zero waste industry*, melalui program 3 R (*Reuse, Recover, Recycle*), dan mengembangkan Penelitian dan Pengembangan untuk mencari energi alternatif.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial dalam RANGKA Mendukung KEMAJUAN IPTEK

Menteri Sosial RI, Salim Segaf Al-Jufri, memberikan paparannya terkait dengan Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Mendukung Kemajuan IPTEK di hadapan peserta Pendidikan Reguler Angkatan XLIV Lemhanas RI tahun 2010 pada 29 Juli 2010 di Gedung Pancagatra Lt. III Barat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan, di sisi lain dapat disalahgunakan dan

menambah kemiskinan, untuk itulah Salim Segaf melihat pentingnya penerapan Model Pemberdayaan dalam mengatasi kemiskinan. Model pemberdayaan (*empowerment models*) adalah untuk memberdayakan/*to enable* yaitu memberi kemampuan pada pihak lain agar mampu hidup mandiri, yang diharapkan mampu memberi perubahan sikap, peningkatan partisipasi sosial, solidaritas sosial, peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, dan peningkatan pelaksanaan fungsi keluarga miskin.

Pendekatan *empowerment model* dibagi dalam 3 (tiga) kluster yaitu program perlindungan sosial; program pemberdayaan untuk penguatan, keberdayaan dalam mengatasi masalah; pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk mengelola kegiatan/unit usaha ekonomis produktif dengan berbagai jenis unit usaha. Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan



salah satu peserta dari negara sahabat menyampaikan pertanyaan

untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rumah tangga miskin, memperbaiki kesenjangan, ketidakberdayaan dan "*social exclusion*", serta percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/ *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada saat ini berbagai pengembangan IPTEK diupayakan untuk mengatasi kemiskinan, sebab ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, memberikan paparannya kepada para Peserta PPRA XLIV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL



Menteri Pendidikan RI, Mohammad Nuh, memberikan ceramah mengenai strategi dan arah kebijakan pendidikan nasional kepada para peserta PPRA XLIV

Dunia pendidikan adalah dunia yang kompleks karena spektrumnya sangat luas, menantang karena menentukan masa depan bangsa, dan mulia karena memanusiaikan manusia. Menteri Pendidikan, Mohammad Nuh, memberikan ceramahnya mengenai strategi dan arah kebijakan pendidikan nasional di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lemhannas RI pada 29 Juli 2010 di Gedung Pancagatra Lt.III Barat.

Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional



Bagan Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Nuh memaparkan visi tahapan pembangunan pendidikan nasional pada 2014, yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Strategi Umum Pembangunan Pendidikan-Renstra 2010-2014

Komponen	Strategi Umum
1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Penyediaan pendidik yang kompeten dan merata. Penyediaan manajemen satuan pendidikan yang kompeten dan merata.
2 Pembelajaran dan Penilaian (Substansi Pendidikan)	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Penyediaan data & informasi serta pelaksanaan akreditasi.
3 Sarana dan Prasarana (Satuan Pendidikan)	Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata.
4 Pendanaan (Peserta Didik dan Warga Belajar)	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan biaya layanan pendidikan formal berkualitas yang merata. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran nonformal dan informal yang merata.
5 Tata Kelola	Penataan struktur organisasi. Penguatan sistem perencanaan dan pencatatan. Penguatan sistem Pengawasan.

Bagan Strategi Umum Pembangunan Pendidikan Nasional

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: **pertama**, Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota; **kedua**, Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota; **ketiga**, Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota; **keempat**, Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi; **kelima**, Tersedia dan terjangkaunya layanan Pendidikan Orang Dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan **keenam**, Tersedianya Sistem Tata Kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional.

Pada 2014, Kementerian Pendidikan memiliki visi **"Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif"**.

Mohammad Nuh juga memaparkan tentang strategi umum pembangunan pendidikan nasional, sesuai dengan visi 2014 yaitu menyelenggarakan pelayanan prima, maka perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan adalah dengan menghadirkan pendidik dan tenaga kependidikan, komponen pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

RAPAT DIREKTIF SSDN PPRA XLV

Pada tanggal 20 Juli 2010, Deputi Bidang Pendidikan Pim. Tk. Nas, Mayjen TNI Suroyo Gino memimpin Rapat Direktif yang diadakan di Gd. Astagatra Lt. III Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh para Direktur beserta staf dari Deputi Pendidikan, Tajar, Taji, Taprof, serta Pejabat Lemhannas RI lainnya. Dalam



Deputi Pendidikan Bid. Pim. Tk. Nas. Mayjen TNI Suroyo Gino memimpin Rapat Direktif di Gd. Astagatra Lt. III Barat

kesempatan tersebut dibahas persiapan pelaksanaan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) yang bertujuan ke Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Provinsi Maluku Utara. SSDN tersebut memiliki beberapa sasaran diantaranya untuk mengetahui gambaran umum tingkat kondisi Ketahanan Nasional di Daerah.

Sesuai dengan Rencana Garis Besar yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SSDN, Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLV Lemhannas RI tahun 2010 akan melakukan kegiatan lapangan selama lima hari, dimulai dari tanggal 29 Agustus sampai 3 September 2010. Rombongan terdiri dari 130 orang (100



Suasana Rapat Direktif SSDN PPRA XLV

peserta dan 30 staf Lemhannas RI), dibagi dalam 4 (empat) rombongan. Disamping untuk mengetahui kondisi Ketahanan Nasional di daerah, sasaran kegiatan SSDN tersebut adalah untuk memperoleh gambaran potensi, program, dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional serta permasalahan yang dihadapi.

PENYERAHAN BUKU PENGETAHUAN DARI PESERTA PPRA XLIV KE PERPUSTAKAAN LEMHANNAS RI

Rabutanggal4Agustus2010pukul13.00WIBdiselenggarakan acara Penyerahan Buku Pengetahuan dari para peserta PPRA XLIV ke Perpustakaan Lemhannas RI. Buku yang disumbangkan sebanyak 102 (seratus dua) buah diantaranya adalah **"Leadership Without Borders (Successful Strategies from the World Class Leaders)"** oleh E.D. Cohen, **"World is Flat (the Globalized World in the Twenty-first Century)"** oleh Thomas L. Friedman, **"Political Reform in Indonesia after Soeharto"** oleh Harold Crouch, dan **"Meluruskan Jalan Demokrasi"** oleh H. Wiranto, SH. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Brigjen TNI Meris Wiryadi, selaku Ketua Senat PPRA XLIV kepada Brigjen TNI Kusworo selaku Karo Humas Settama Lemhannas RI yang disaksikan oleh Deputi Bidang Pendidikan Pim. Tk. Nasional Mayjen TNI Suroyo Gino. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan peserta PPRA XLIV, Tajar, Taji, Taprof, dan juga beberapa pejabat dari Deputi Bidang Pendidikan.

Buku-buku yang diserahkan diperoleh peserta PPRA saat melakukan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN). Ketua Senat PPRA XLIV mengaku merasa senang dan bangga karena penyerahan buku tersebut diacarakan secara resmi, ia juga berharap dengan buku-buku yang diserahkan tersebut dapat menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan di perpustakaan Lemhannas RI, dan dapat bermanfaat kepada peserta PPRA maupun PPSA tahun berikutnya. Sedangkan Karo

Humas atas nama Lemhannas RI menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para peserta PPRA XLIV, karena sumbangan buku-buku tersebut merupakan langkah positif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan perpustakaan Lemhannas RI.



Penyerahan Buku Pengetahuan secara simbolis oleh Ketua Senat PPRA XLIV kepada Karo Humas Settama Lemhannas RI yang disaksikan oleh Deputi Pendidikan

KUNJUNGAN DELEGASI

NATIONAL DEFENCE COLLEGE OF THAILAND

Delegasi *National Defence College of Thailand* mengunjungi Lemhannas RI pada 27 Juli 2010. Rombongan yang dipimpin oleh Lt.



Acara Diskusi yang diselenggarakan di Ruang Rapat Astagatra Lt. III Barat

Gen. Atthaya Sukonthasingha melakukan *Courtesy Call* kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsdya TNI Dr. Rio Mendung Thalieb dengan didampingi oleh Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP, dan Karo Kerma, Brigjen TNI Endang Hairudin, ST, M.M.

Selanjutnya, rombongan mengadakan diskusi bertema terorisme bertempat di Gedung Astagatra Lt.3 Barat. Diskusi ini dimoderatori oleh Marsda TNI (Purn) Surya Dharma, S.IP, dan sebagai narasumber yaitu Mayjen TNI (Purn) Pandji Soesilo dan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan. Diskusi ini antara lain membahas tentang sekitar ancaman



Wakil Gubernur menerima Delegasi National Defence College of Thailand yang dipimpin oleh Lt. Gen. Atthaya Sukonthasingha

terorisme di Asia Tenggara, masih belum jelasnya definisi tentang terorisme, dan pengalaman Indonesia menghadapi dan menanggulangi terorisme.

KUNJUNGAN

THE NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL (NPS) DAN THE DEFENCE THREAT REDUCTION AGENCY (DTRA)

Rombongan *the Naval Postgraduate School (NPS)* dan *Chief of the Advanced Concepts Division of the Defence Threat Reduction Agency (DTRA)* mengunjungi Lemhannas RI pada 29 Juli 2010. Rombongan melaksanakan *Courtesy Call* kepada Wakil Gubernur



Courtesy call Rombongan NPS dan Chief of the Advance Concepts Division of DTRA kepada Wakil Gubernur

Lemhannas RI, Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb yang didampingi oleh Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, dan Karo Kerma, Brigjen TNI Endang Hairudin, ST, M.M. Kemudian, rombongan melaksanakan diskusi dengan pejabat Lemhannas RI bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gedung Trigatra. Diskusi yang merupakan bagian dari Rencana Dialog Strategis Indonesia–Amerika tahun 2011 yang akan datang dimoderatori oleh Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, diikuti oleh Dirjian Internasional Debidjianstrat Mauliate Simorangkir, M.Sc.; Taprof Bid. Ekonomi, Dr. Rosita Noer, M.A., Ir. Timotius D. Harsono, M.Sc; dan Karo Kerma Settama, Brigjen TNI Endang Hairudin, S.T., M.M.

Diskusi tersebut membahas tentang perkembangan China, Pakistan, India,



Diskusi yang merupakan bagian dari Rencana Dialog Strategis Indonesia–Amerika tahun 2011

Korea Selatan, Jepang, Australia, lingkungan hidup, demokrasi, perubahan iklim, militer, terorisme, keamanan makanan, ekonomi, energi di masa depan, pasar bebas, *Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)*, dan konflik Laut China Selatan.

KUNJUNGAN PERPAMSI

Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. yang didampingi oleh Wakil Gubernur, Sekretaris Utama, Karo Humas, dan Karo Kermenerima *courtesy call* rombongan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) pada 8 Juli 2010. Perpamsi didirikan tanggal 8 April 1972 oleh 50 PDAM yang ada pada masa itu, dalam Musyawarah antar Perusahaan Air Minum (MAPAM) seluruh Indonesia yang pertama di Kopeng, Jawa Tengah. Perpamsi mewakili semua Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sejak tahun 1972, dan berperan dalam pengaturan kegiatan dan peningkatan kinerja perusahaan PDAM.

Pada kesempatan tersebut, Perpamsi menyampaikan Presentasi sebagai bagian dari persiapan pembuatan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Lemhannas RI dengan Perpamsi. Perpamsi memiliki visi untuk menjadikan asosiasi perusahaan air minum profesional yang memberikan pelayanan berkualitas bagi para anggotanya. Misi Perpamsi yaitu: melayani para anggota; mendorong peningkatan kinerja para anggota; menjalin kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan; memfasilitasi pengembangan kapasitas; memberikan kontribusi positif bagi semua pemangku kepentingan; dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good*



Courtesy call yang dilakukan di Ruang Kerja Gubernur Lemhannas RI

corporate governance). Sampai saat ini anggota Perpamsi terdiri dari 394 badan penyelenggara pelayanan air perpipaan, dengan total jumlah pelanggan nasional per Februari 2010 yaitu lebih dari 8 juta pelanggan.

KUNJUNGAN PARFI

Selasa, 20 Juli 2010 Pengurus Persatuan Artis dan Film Indonesia (PARFI) dipimpin Ketua Umumnya, Jenny Rachman berkunjung ke Lemhannas RI dalam rangka persiapan MoU antara Lemhannas RI dengan PARFI. Sebagai Agenda pertama kunjungan adalah *Courtesy Call* Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Umum PARFI kepada Gubernur Lemhannas RI, Prof. DR. Muladi, S.H. Selesai *Courtesy Call*, dilanjutkan Agenda kedua, Presentasi *Profile Company* PARFI, Lemhannas RI dan diskusi antara PARFI dengan Lemhannas RI yang dipimpin oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI DR. Ardi Partadinata.

Sekretaris Utama Lemhannas RI dalam sambutannya menjelaskan kepada para pengurus dan anggota PARFI bahwa Lemhannas RI adalah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, dipimpin oleh Gubernur yang kedudukannya setara dengan menteri. Lemhannas RI adalah sebagai Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi mendidik calon-calon pimpinan tingkat nasional; pengkajian strategis

nasional, regional, dan internasional; dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Selanjutnya dikatakan bahwa Lemhannas RI menerima calon-calon peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dari berbagai kalangan dan profesi. Jadi bagi PARFI terbuka kesempatan untuk mengirimkan calonnya mengikuti



Gubernur Lemhannas RI menerima courtesy call pengurus PARFI

pendidikan di lembaga ini, dengan syarat bagi yang menduduki jabatan pimpinan atau ketua baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan Ketua Umum PARFI Jenny Rachman dalam kata sambutannya mengatakan bahwa

kunjungan para pengurus PARFI di lembaga ini dalam rangka peninjauan dan pendahuluan rencana MoU antara PARFI dengan Lemhannas RI, yang merupakan kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi PARFI. Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan Kongres PARFI, terdapat 3 (tiga) prioritas di dalam program kerja PARFI, yaitu: **Pertama**, Pendidikan dan Latihan; **Kedua**, Kesejahteraan dan apresiasi; dan **Ketiga**, Dalam bidang pendidikan dan latihan sebagaimana yang menjadi prioritas PARFI, merupakan program yang sangat penting dan perlu untuk bisa bekerjasama dengan Lemhannas RI, sehingga para pengurus PARFI dan para anggotanya, serta para artisnya dapat menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu politik, kebangsaan, wawasan nusantara, dan sebagainya. Karena artis harus dapat berada di mana saja di lapisan masyarakat, termasuk dilingkungan politik, sehingga pengetahuan dan wawasan yang baik terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dimiliki.

DISKUSI PANEL

"PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU/PEMILUKADA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER"

Kamis, 29 Juli 2010, pukul 08.30-13.00 WIB, di Gedung Asta Gatra Lt. III Barat Lemhannas RI diadakan diskusi panel mengenai peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilukada untuk mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam mendukung program *clean government* dan *good governance*. Diskusi Panel ini dibuka oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI DR. Rio Mendung Thalieb dan juga di hadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar.

Partisipasi perempuan Indonesia di dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebuah keniscayaan kaum perempuan di Indonesia yang merupakan bagian dari proses perjuangan dan pembangunan nasional. Kemajuan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perempuan sebagai aset bangsa dan eksistensinya



DR. Dewi Motik Pramono, M.Si dan DR. R. Siti Zuhro, MA. turut hadir pada Diskusi Panel di Lemhannas RI

sebagai manusia yang memiliki keluhuran harkat dan martabat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang semakin lebar bagi perempuan untuk berpartisipasi khususnya dalam pembangunan politik. Komitmen pemerintah tercermin dalam sejumlah regulasi yang secara jelas mengikat partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 1999 Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti karena terpilihnya wakil presiden perempuan pertama yaitu Megawati Soekarno Puteri dan selanjutnya pada tahun 2001 terpilih menjadi presiden RI. Diikuti dengan meningkatnya sejumlah perempuan yang duduk di legislatif, eksekutif termasuk TNI dan Polri, serta yudikatif. Inti dari kesetaraan gender bukanlah untuk meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi, melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan. Sistem kuota secara efektif bertujuan memperbaiki politik tradisional yang berpusat pada laki-laki dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Dengan demikian dalam jangka pendek mengadopsi sistem kuota terkait dengan kepastian hukum dan UU pemilu adalah untuk menjamin representasi perempuan dalam pembangunan politik.

Sedangkan tujuan jangka panjangnya



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar hadir berpartisipasi pada Diskusi Panel yang diselenggarakan di Lemhannas RI

adalah mendorong banyak perempuan muda untuk meningkatkan kualitas dan termotivasi sebagai penggerak dalam politik dan menjadi politisi yang prospektif.

Dalam *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Wakil Gubernur disampaikan bahwa urgensi meningkatkan kapabilitas perempuan dalam bidang politik perlu didukung oleh media, selain membangun jaringan yang kuat melalui asosiasi perempuan. Jika kapasitas intelektual perempuan telah terbangun, maka tidak perlu lagi diberlakukan kuota sebagai hak istimewa (*privilege*) untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Hal ini sesuai dengan kaidah kesetaraan gender, di mana kesetaraan pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang *given* atau dianugerahkan, melainkan harus diperjuangkan sendiri oleh kaum perempuan.

Pengarah : DR. Ardi Partadinata, M.H., M.Si.

Penanggung Jawab : Brigjen TNI Kusworo, **Redaktur :** Kolonel Caj. M. Sochib SM

Penyunting/Editor : Letkol Adm. Drs. M. Syahril, M.M., Mayor Inf. Risnal S.H., M.A.

Redaktur Pelaksana : Linda Purnamasari, Endah Heliana, S.Sos., Trias Noverdi, S.S.

Desain Grafis & Fotografer : Arief Musadayan, Arianto, Bambang Iman Aryanto, S.T.

Sekretariat : Syafrizal, Gatot

Alamat Redaksi : Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jak-Pus (10110)

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>